



▶ ANGKRINGAN PAKDE HARJO

Sampah Visual Bikin Emosi...

Pakde Harjo hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan hujan deras yang turun membasahi Kota Jogja. Gara-gara itu, dia telat datang ke Angkringan Pakde Harjo yang sudah digelar siaran di Star Jogja FM, beberapa menit sebelumnya. Bersama keponakanannya, Anang dan pengunjung tetap, Mbak Miskun berbincangan malam tadi seputar sampah visual. Berikut ini laporan wartawan Harian Jogja, MG Noviarizal Fernandez.

“Lha Pak RW ke mana, tumben kok nggak datang,” celoteh Mbak Miskun kehe-ranan sambil menyeruput teh gula batu.

“Akhir-akhir ini, Pak RW memang rada sibuk maklum masa kampanye sudah dekat,” sindir Pakde Harjo sambil keplas-keplus.

Tiba-tiba, dari keremangan malam muncul seseorang tak dikenal dan langsung nyerocos. “Teh jahe ora nganggo suwi lho. Saya ini tangan kanannya Pak RW,” kata pria yang mengaku bernama Den Baguse Darmuji.

Spontan, para penghuni tetap Angkringan Pakde Harjo kaget bukan kepalang. Den Baguse Darmuji kemudian menjelaskan, dia datang atas perintah Pak RW karena membawa dua tamu agung.

“Tamu agung *sopo kuwi* [siapa itu]?” tanya Pakde Harjo penuh penasaran. Ternyata tamunya memang dua orang penting yaitu Kepala Dinas Ketertiban Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja, Nurmuji dan Aktivistis Komunitas Resik Sampah Visual (KRSV), Sumbo Tinarbuko.

Nurmuji memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan peran instansinya dalam penanganan persoalan sampah visual. Terkait reklame, kata dia, ada Peraturan Daerah (Perda) No.8/1998 yang hingga kini masih berlaku. Di dalam Perda itu, dijelaskan mengenai jenis reklame yaitu komersial dan nonkomersial.

“Ada cara gampang membedakan mana reklame berizin atau tidak berizin. Cek saja ada stikernya atau tidak. Kalau tidak ada stiker dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Jogja,” kata dia.

Menurut Kepala Dintib itu kemudian menjelaskan, sanksi terberat dari perda No.8/1998 itu, yakni denda maksimal Rp50 juta atau kurungan tiga bulan penjara melalui keputusan hakim dalam sidang tindak pidana ringan. Tapi, sebelum dipidana, prosedur yang dilakukan dengan melakukan operasi yustisi, kemudian mempringatkan pemasangan reklame selama tiga kali, barulah dipidanakan.

“Selama 2013, kami sudah menertibkan 524 spanduk, 1.060 road

text, dan pamflet 243 buah. Tapi itu belum maksimal karena kami mengalami keterbatasan petugas yang hanya berjumlah 96 orang,” lanjut Nurmuji.

Karena itu, sang bos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu mengharapkan peran serta masyarakat untuk menginformasikan kepada petugas jika melihat ada pemasangan reklame yang diduga kuat tidak berizin, di lingkungan tempat tinggal warga. Informasi itu bisa disalurkan melalui telepon hotline 561415.

Sumbo Tinarbuko yang sedari tadi asyik mengunyah tahu susur tidak mau kalah untuk angkat bicara: Laki-laki berkacamata itu bilang pengaturan reklame itu harus berdasarkan pada masterplan. Pemkot Jogja, lanjut dia, saat ini tidak kunjung menyelesaikan masterplan tersebut dan masih berpedoman pada masterplan di zaman walikota sebelumnya.

“Sing luwih marai emosi [yang lebih membuat emosi], perda tentang reklame sampai sekarang masih ngendon di DPRD. Dulu jadinya bulan Juni sudah selesai tapi sampai November belum rampung juga,” serunya.

Ia mengajak warga Kota Jogja agar peduli terhadap persoalan sampah visual selain karena banyak yang tidak berizin, juga karena mengganggu estetika kota. Bagi warga yang menemukan ada sampah visual, bisa dipotret, kemudian diunggah ke Facebook Sampah Visual.

“Setiap foto dan gambar dari masyarakat kami serahkan kepada pemerintah agar bisa ditindaklanjuti dengan segera,” beber Sumbo penuh semangat dan para penghuni Angkringan Pakde Harjo kembali hanya bisa manggut-manggut.




Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005